

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardiansyah. (2023). *Hukum Perizinan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Chaida, A., Heriyanto, P., Hendarsyah, F., Saraswati, I., & Baringbing, M. S. (2021). *Kebijakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Damanik, P., Nugraha, S., Widyastuti, T. V., & Nur, F. (2024). *Hukum Administrasi Negara Teori, Prinsip, dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan*. Medan: Media Penerbit Indonesia.
- Darmayani, S., Juniatmoko, R., Martiansyah, I., Harri, M. R., & Wattimena, C. M. A. (2022). *Dasar – Dasar Konservasi*. Bandung: Widina Media Utama.
- Gai, A. M., Taufiq, M., Fortega, G. F. D., & Almulqu, A. A. (2025). *Hukum Lingkungan: Prinsip, Regulasi dan Implementasi dalam Perlindungan Alam*. Medan: Media Penerbit Indonesia.
- Karinda, K. (2021). *Sosiologi Pemerintahan*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Mustomi, O., & Sutrisno, E. (2025). *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Penataan Ruang*. Medan: Media Penerbit Indonesia.
- Pamuji, K., Nasihuddin, A. A., Kartono., Sunarti, R., Handayani, S. W., Hartini, S., Kupita, S., & Cahyani, E. D. (2023). *Buku Ajar: Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto: Unsoed Press.
- Ramlan., Kusniati, R., Farisi, M., Harahap, R. R., & Putra, A. K. (2025). *Hukum Laut Internasional*. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Riewanto, A., Omara, A., Sihombing, E., Isnawati., Cornelis, V. I., Tjandra, R., & Mukminto, E. (2023). *Hukum Tata Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Situmorang, D. B., Manurung, V. T., & Indrajaya, K. (2024). *Perspektif Masyarakat dalam Industri Pertambangan: Tantangan dan Peluang*. Medan: Media Penerbit Indonesia.
- Sofyan, A. (2022). *Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-Undangan Universitas Lampung.
- Sulaksono. (2022). *Teori – Teori Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Wihelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Padang: Get Press Indonesia.

Jurnal atau Artikel Ilmiah

- Abikusna, R. A. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Sosfilkom*, 13(1).
- Al-Banna, H., Adiyanta, F. C. S., & Azhar, M. (2023). Implementasi Pengawasan Usaha Pertambangan Komoditas Batuan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 12(4).
- Alif, N., Maskun., & Aspan, Z. (2023). Efektivitas Izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terhadap Budidaya Rumput Laut di Daerah Pesisir di Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Tana Mana*, 4(2).
- Amir, N., & Watumlawar, J. (2022). Tinjauan Yuridis terkait Izin Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil di Indonesia Pasca Hadirnya Omnibus Law. *Jurnal Hukum*, 1(1).
- Azhar, M. (2015). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara. *Jurnal Notarus*, 8(2).
- Azhar, M. (2019). *Buku Ajar Hukum Pertambangan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Azhar, M., & Satriawan, D. A. (2018). Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional. Administrasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 1(4).
- Azizah, F. N. (2022). Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Buletin Hukum & Keadilan*, 6(4).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1).
- Damayanthi, N. M. R. (2025). Tinjauan terhadap Pengelolaan Perbatasan menurut Perspektif Hukum Internasional. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(3).
- Dzulfikar, M. A. (2022). Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyalahgunaan Wewenang pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurist-Diction*, 5(6).
- Endrawati. (2019). Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kota Palangka Raya. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Fikri, H., Sagala, P., & Suswanto, T. A. (2025). Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Militer dalam Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas pada Perkara Tindak Korupsi. *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1).
- Harsya, R. M. K., & Rohmah, U. A. (2023). Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Suami Istri sebagai Pejabat Pemerintahan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon). *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4).
- Husen, O. O., Abdullah, N., Farastui, E. R., Kartini, N., & Irawan, H. (2024). *Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Indonesia*. Ternate: Kamiya Jaya Aquatic.

- Ismiyanto. (2022). Efisiensi Perizinan Membangun Investasi dalam Lingkup Otonomi Daerah sebagai Perwujudan Fungsi Welfare State. *Jurnal Serambi Hukum*, 15(1).
- Marasi, W., Frederik, W. A. P. G., & Pinasang, R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Masyarakat di kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Kegiatan Pertambangan di Sulawesi Utara. *Jurnal Tana Mana*, 4(2).
- Natalis, A., Gutami, B., & Azhar, M. (2017). Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pelaku Illegal Mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. *Diponegoro Law Journal*, 6(2).
- Papendang, Y. M., Maramis, R. A., & Pinasang, D. R. (2023). Pemberian Izin Pertambangan pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Era Otonomisasi. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(3).
- Pratiwi, D. A., & Suhartono, S. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Pertambangan Minyak. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, 5(1).
- Priyanta, M. (2021). Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan. *Wawasan Yuridika*, 5(1).
- Putri, M. C., & Siregar, A. P. (2023). Konstitusionalitas Diskresi Kebijakan Finansial Pemerintah yang Berkeadilan: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/ PUU-XVIII/2020. *Proceeding APTHTN-HAN*, 1(1).
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Sistem Negara Hukum. *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 2(2).
- Rafiqi, I. D. (2021). Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(2).
- Risman. (2025). Dampak Pencemaran Laut terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Demersal. *PERAUT: Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 2(1).
- Rizkiyani, S., & Mujab, S. (2024). Kekuasaan dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4).
- Satmaidi, E., Barus, S. I., Saifulloh, P. P. A., & Reformas, T. (2021). Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Guna Mendukung Program Wisata Kawasan Pesisir Provinsi Bengkulu. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1).
- Sembiring, E., Nainggolan, S. A., Hutasoit, S. A., Emelica., Saputra, A. W., Johanes, B., Simanjuntak, H. F. Y., & Murati, F. (2024). Pengaruh Pertambangan terhadap Lingkungan Lingkungan dan Sosial Masyarakat. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8(11).
- Setyawan, A., Sinaga, P., & Bhakti, T. S. (2025). Pengelolaan Pesisir Pasca UU Cipta Kerja: Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(4).
- Shidiq, F. (2025). Izin Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 2(1).

- Subair, L. (2024). Eksistensi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Wilayah Pesisir di Luwu Utara (Perspektif Hukum Lingkungan). *Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Sudjati, X. Q. D., & Abidin, I. K. R. (2021). Penyalahgunaan Wewenang Pemerintah Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Perusahaan PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 1(1).
- Susanto, S. N. (2019). Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4).
- Susanto, S. N. (2019). Good Governance dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(2).
- Susanto, S. N. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1).
- Susanto, S. N. (2020). Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(4).
- Susanto, S. N. (2020). Metode Perolehan dan Batas – Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(3).
- Susanto, S. N. (2021). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Praktik Peradilan di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(3).
- Tohari, A. R., & Indrayanti, K. W. (2023). Kajian Kewenangan Kepala Daerah dalam Pemberian Izin Pertambangan di Kalimantan Timur. *Merdeka Law Journal*, 4(2).
- Yuniza, M. E., Nandita, N. N. D. R., & Maharani, N. P. M. (2023). Sumber Kewenangan Pemerintah: Permasalahan dan Prospek Pengaturannya dalam Ius Constituendum. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 12(4).

Peraturan Perundang – Undangan

- Pemberitaan Harian Kompas tahun 2021 tentang Aktivitas Tambang Pasir Laut di Bangka Belitung.
- Pemberitaan Majalah Tempo tahun 2021 tentang Izin Pertambangan Emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.